

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi, 2003)*, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65.

### Buku:

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance Etika dalam Praktik Bisnis*, Tangerang: Mitra Wacana Media.

Setyo Wahyudi, Bambang. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II, Pertimbangan Hukum Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan bidang Perdata dan TUN*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers.

Salim, Nurbani, Erlis Septiana. 2013. *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rosdy, Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Publik*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada.

### **Karya Ilmiah:**

Arif, Barda Nawawi. “Upaya Non Panel dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18.

Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan”. Dalam Jurnal Hukum Progresif. Vol.1, No. 1 April 2005. Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

Effendy, Marwan, “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, makalah disampaikan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 4 Oktober 2012.

Ansari, Muhamman Insan. Indra Kesuma Hadi, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. No. 60, Th. XV Agustus 2011.

Putra, Agus Kelana, dkk, “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, Syah Kuala Law Journal, Vol.1 2 Agustus 2017, pp. 163-182, Aceh, Universitas Syah Kuala.

### **Sumber Lainnya:**

<https://www.idxchannel.com/market-news/erick-thohir-cari-orang-hebat-untuk-kelola-rp8300-t-aset-bumn>

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/17.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010>

<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

Elly Halimatusadiah, Bangun Gunwan, Analisis Penerapan GCG dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi. 2014;

<http://www.ti.or.id> Transparency International

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/1TAHUN2008PP.htm>